

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan fiskal yang berkesinambungan (*Sustainable fiscal management*) diartikan sebagai upaya pengelolaan fiskal dalam rangka mempertahankan kemampuan pemerintah menjaga keuangan negara untuk tetap berada pada kondisi yang kredibel serta mampu menyediakan layanan publik dalam jangka panjang (BPK, 2019). Upaya mewujudkan kesinambungan fiskal inilah yang mendorong terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagai payung hukum yang bersifat mengikat atas pengelolaan keuangan negara.

Komponen penting dalam mewujudkan kesinambungan fiskal yaitu adanya keterbukaan serta akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara. Upaya dalam mewujudkan kondisi tersebut salah satunya melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah yang diterima secara umum. Laporan pertanggungjawaban keuangan diperoleh melalui serangkaian proses akuntansi dimulai dengan pengakuan serta pengukuran berbasis akrual atas pendapatan dan belanja. Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2015)

mengartikan akuntansi berbasis akrual sebagai suatu basis akuntansi melakukan pengakuan, pencatatan serta penyajian berbagai transaksi ekonomi ataupun peristiwa lainnya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pada saat transaksi tersebut terjadi, tanpa melihat waktu terjadinya penerimaan atau pembayaran kas ataupun setara kas.

Akuntansi berbasis akrual mampu menyajikan gambaran yang lebih baik tentang sejauh mana kinerja suatu entitas dalam suatu periode berjalan (Gnanarajah, 2014). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyebutkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual bertujuan untuk memberikan penyajian laporan keuangan yang memberikan manfaat lebih kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) dibandingkan biaya yang telah dikeluarkan.

Salah satu bagian penting dari laporan pertanggungjawaban keuangan yang dihasilkan dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrual adalah neraca tiap-tiap entitas. Neraca memberikan gambaran atas posisi keuangan suatu entitas pada tanggal tertentu dan memuat unsur-unsur mengenai aset, kewajiban dan ekuitas. Selain itu, neraca juga memberikan gambaran terkait kemampuan suatu entitas melaksanakan tugas dan fungsinya di masa mendatang.

Jumlah aset tetap per 31 Desember 2020 sebagaimana termuat dalam LKPP Tahun 2020 adalah Rp5.976.014.521.058.706,00 atau sebesar 53.84% dari total keseluruhan aset sebesar Rp11.098.674.484.349.478,00. Persentase tersebut menunjukkan bahwa aset tetap mempunyai nilai yang begitu signifikan dalam laporan keuangan, dalam hal ini neraca. Mengingat besarnya porsi aset tetap

serta tingkat kompleksitas yang tinggi dalam pengelolaan serta penyajiannya, maka diperlukan pedoman terkait perlakuan akuntansi atas aset tetap agar diperoleh kesamaan pemahaman serta persepsi atas akuntansi aset tetap di lingkungan pemerintah. Pedoman tersebut telah dimuat dalam lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dalam hal ini PSAP 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap serta Buletin Teknis SAP nomor 15 Tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua.

Melalui pedoman terkait akuntansi aset tetap, masing-masing entitas diharapkan mampu menyajikan dan mengungkapkan besaran nilai aset tetap sesuai dengan kondisi sesungguhnya, sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan suatu entitas melaksanakan tugas, fungsi serta kegiatan pemerintah yang melekat pada entitas terkait, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Namun, nyatanya masih ditemukan ketidaksesuaian atas pengelolaan serta pelaksanaan akuntansi aset tetap pada lingkungan pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan, melalui Laporan Hasil Pemeriksaan Atas LKPP Tahun 2020 mengungkapkan temuan atas permasalahan dalam pengelolaan aset tetap yang berpengaruh terhadap kevalidan serta keakuratan data, beberapa diantaranya yaitu penyajian aset tetap dengan nilai buku minus, pencatatan aset tetap dengan nilai perolehan minus, serta pencatatan ganda nilai perolehan suatu aset tetap.

Begitu pentingnya pos aset tetap dalam neraca serta masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam pengelolaan serta penyajian aset tetap sebagaimana tersebut di atas, memberikan ketertarikan kepada penulis untuk

meninjau kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap sebagaimana dimuat dalam PSAP 07 dan Bultek Nomor 15 dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam karya tulis tugas akhir ini, penulis memilih KPPN Semarang I sebagai objek penelitian. Pemilihan KPPN Semarang I sebagai objek penelitian didasarkan pada fakta bahwa belum terdapat karya tulis tugas akhir terkait pelaksanaan akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I. Hasil Tinjauan atas pelaksanaan akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I akan dipaparkan dalam karya tulis tugas akhir ini dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERBASIS AKRUAL PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat ditarik fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pengakuan aset tetap pada KPPN Semarang I dengan PSAP 07 dan Bultek Nomor 15?
2. Bagaimana kesesuaian pengklasifikasian aset tetap pada KPPN Semarang I dengan PSAP 07 dan Bultek Nomor 15?
3. Bagaimana kesesuaian pengukuran aset tetap pada KPPN Semarang I dengan PSAP 07 dan Bultek Nomor 15?
4. Bagaimana kesesuaian penyajian dan pengungkapan aset tetap, termasuk penyusutan, pada KPPN Semarang I dengan PSAP 07 dan Bultek Nomor 15?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Memperdalam pemahaman penulis terkait dengan akuntansi aset tetap melalui peninjauan atas implementasi akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I
2. Mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I dengan PSAP 07 serta Bultek Nomor 15.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya tulis tugas akhir ini membahas penerapan akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I yaitu meliputi pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap. Bahasan terkait penyajian dan pengungkapan aset tetap sekaligus mencakup bahasan mengenai penyusutan aset tetap, mengingat informasi tersebut termuat dalam CaLK sebagai bagian dari pengungkapan aset tetap. Namun, dalam karya tulis tugas akhir ini tidak mencakup bahasan terkait dengan perlakuan terhadap pengeluaran setelah perolehan awal serta penghapusan aset tetap.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan karya tulis tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan, wawasan dan pengalaman kepada penulis terkait akuntansi aset tetap, baik teori maupun praktik di lapangan, khususnya praktik akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I.

2. Memberikan gambaran terkait dengan kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I dengan ketentuan yang berlaku, baik PSAP 07 maupun Bultek Nomor 15.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

Karya tulis tugas akhir ini terbagi ke dalam empat bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan menjelaskan gambaran umum permasalahan yang akan dibahas dalam KTTA ini. Bagian ini meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat penulisan serta sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini memuat teori dan ketentuan yang berkaitan dengan akuntansi aset tetap. Selain itu, digunakan pula penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam karya tulis tugas akhir ini. Teori, ketentuan, serta publikasi penelitian terdahulu yang dimuat pada bagian landasan teori inilah yang akan digunakan penulis sebagai landasan peninjauan penerapan akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Terdapat tiga bahasan utama dalam bagian ini, yaitu metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan serta pembahasan hasil. Bagian pertama menjelaskan metode yang digunakan penulis dalam

pengumpulan data. Terdapat tiga metode yang digunakan, yaitu studi pustaka, wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari ketiga metode tersebut menjadi bahan peninjauan penulis atas penerapan akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I. Lebih lanjut, pada bagian kedua, membahas gambaran umum tentang KPPN Semarang I meliputi visi dan misi, tugas pokok, dan fungsi serta struktur organisasi KPPN Semarang I. Selanjutnya, pada bagian ketiga, menguraikan hasil pengolahan data yang didapat serta menjawab fokus permasalahan sebagaimana disebutkan pada bagian rumusan masalah. Nantinya, pada bagian pembahasan hasil ini terdiri dari empat subbab sesuai dengan banyaknya rumusan masalah.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat simpulan berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan akuntansi aset tetap pada KPPN Semarang I. Simpulan yang dimuat pada bagian ini ditarik dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya dan secara ringkas menjawab rumusan masalah dan/atau tujuan penulisan. Selain itu, akan diuraikan pula beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan serta diharapkan bermanfaat di masa yang akan datang.